

Informasi Perundingan Perdagangan Internasional Sektor Jasa Komunikasi di Indonesia



**Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa
Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku Informasi Perundingan Perdagangan Internasional Sektor Jasa Komunikasi di Indonesia ini dapat terselesaikan. Penyusunan buku informasi ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan di tahun 2021. Buku informasi ini memaparkan tinjauan umum kerja sama perdagangan internasional sektor jasa khususnya jasa Komunikasi. Tinjauan umum tersebut berisikan tentang kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan oleh Indonesia di berbagai forum perdagangan internasional, baik di fora multilateral, regional, maupun bilateral. Selain itu, ditambahkan juga informasi tentang isu perundingan internasional dan peraturan-peraturan yang terkait dengan sektor jasa Komunikasi.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian buku Informasi Perundingan Perdagangan Internasional Sektor Jasa Komunikasi di Indonesia. Akhirnya, dengan adanya buku informasi ini diharapkan pembaca dapat mengetahui dan memahami perkembangan dari perundingan perdagangan jasa di berbagai forum perdagangan internasional.

Jakarta, Desember 2021
Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa
Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I Pendahuluan.....	4
BAB II Sektor Jasa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	11
BAB III Komitmen Unilateral dan Komitmen Perdagangan Internasional serta Offer Sektor Jasa Komunikasi	14
BAB IV Isu Perundingan di Sektor Jasa Komunikasi	101
BAB V Penutup	103
Referensi	104

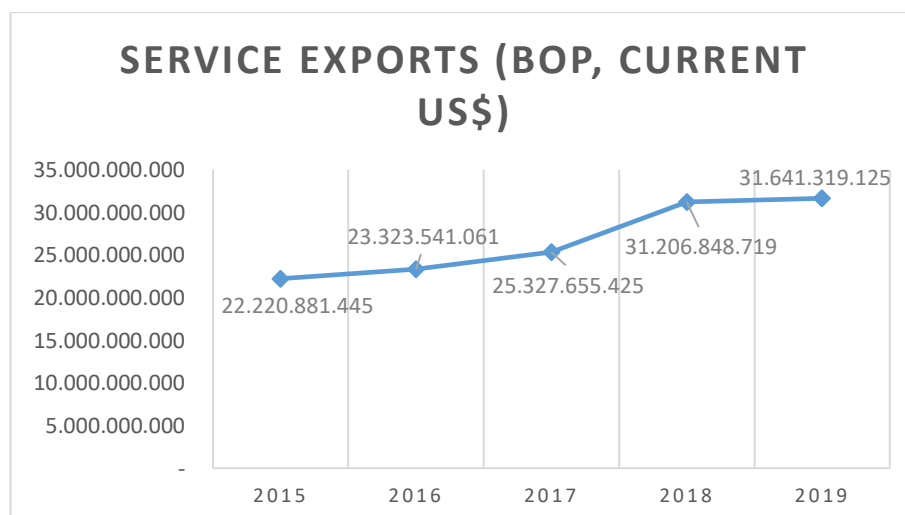
BAB I

PENDAHULUAN

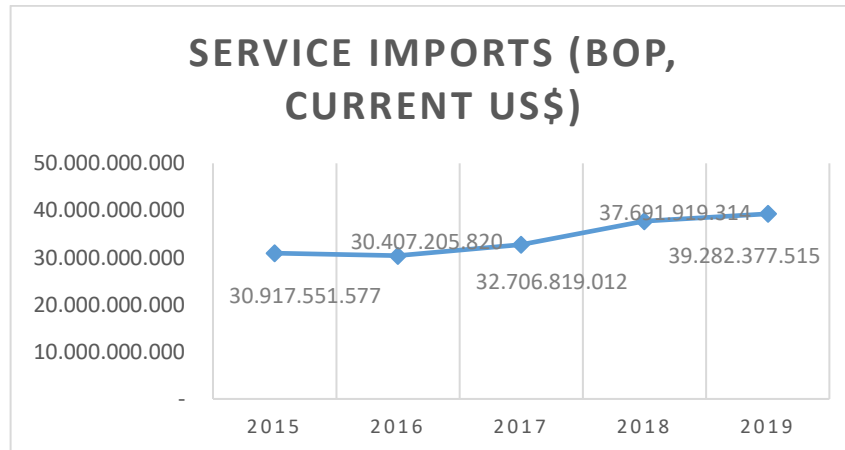
1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan sektor jasa dalam perekonomian nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018, sektor jasa mencapai pertumbuhan tertinggi selama tujuh tahun terakhir jika dibandingkan dengan sektor pertanian dan manufaktur. Adapun, kontribusi sektor jasa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2018 mencapai 54%, di mana sekitar 47% tenaga kerja memperoleh penghidupan dari sektor ini. Nilai ini meningkat dibandingkan 2017 yang tercatat hanya sebesar 43,6%. Menurut Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor jasa dalam Produk Domestik Bruto Indonesia di tahun 2018 didominasi oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; dan dilanjutkan oleh konstruksi serta informasi dan komunikasi. Dalam hal sektor jasa komunikasi, subsektor jasa pos dan kurir mampu berkontribusi pada PDB sebesar 5.41 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 8 – 9 persen.

Dari sisi ekspor, ekspor jasa Indonesia terus mengalami peningkatan dari 22,22 miliar US\$ pada tahun 2015 menjadi 31,64 miliar US\$ pada tahun 2019. Meski demikian, impor jasa Indonesia juga terus mengalami peningkatan pada periode yang sama, yaitu dari 30,91 miliar US\$ menjadi 39,28 miliar US\$ pada tahun 2019.



Nilai Ekspor Jasa Indonesia tahun 2015-2019 (wits.worldbank.org, 2021)



Nilai Impor Jasa Indonesia tahun 2015-2019 (wits.worldbank.org, 2021)

Sektor jasa juga memiliki peran dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian nasional. Hal ini dapat terjadi mengingat peran sektor jasa yang krusial sebagai input bagi sektor-sektor lainnya, seperti sektor pertanian dan manufaktur, untuk dapat menjangkau pasar global. Tentu saja, peranan sektor jasa, termasuk sektor jasa komunikasi akan terus meningkat bagi perekonomian suatu negara seiring juga dengan terus berkembangnya pemanfaatan teknologi digital di seluruh lini kehidupan, termasuk perdagangan internasional.

Perkembangan TIK telah mengubah cara hidup manusia, baik di lingkungan rumah, tempat kerja, sekolah atau di waktu luang. Internet dan perkembangan teknologi digital telah membuat dampak yang paling signifikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam dekade terakhir. TIK telah memasuki era konvergensi dimana perpaduan teknologi dan rantai nilai (value chain) industri telekomunikasi, teknologi informasi, penyiaran, konten beserta industri ikutannya menghasilkan suatu mata rantai baru yang lebih efisien dimana membuat konsumen memperoleh layanan yang terpadu sesuai kebutuhan. Komunikasi yang didukung oleh perkembangan internet memiliki peran penting dalam menghubungkan orang-orang yang memungkinkan orang di negara-negara di seluruh dunia untuk menghubungi satu sama lain melalui e-mail, chatting dan panggilan video, apalagi di tengah masa pandemi Covid-19 ini.

Meskipun pandemi Covid-19 memberikan kontraksi yang cukup dalam pada banyak sektor jasa, namun pada jasa komunikasi, pandemi justru meningkatkan pertumbuhannya. Dunia industri juga telah berubah dan bergeser seiring dengan perkembangan internet dan revolusi digital melalui perkembangan inovasi dan otomatisasi di berbagai sektor sehingga kehadiran internet juga turut menciptakan *internet economy* di berbagai

belahan dunia. Tercatat di kuartir kedua tahun 2020, kebutuhan masyarakat dan korporasi untuk beralih ke digital selama pembatasan aktifitas sosial telah membuat sektor ini bertumbuh sebesar 10.88 persen *year on year*. Untuk itu, daya saing nasional sektor jasa komunikasi perlu ditingkatkan. Berdasarkan kajian Center for Economics and Development Studies, Universitas Padjadjaran tahun 2021, Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara ASEAN lainnya baik dari sisi kecepatan *mobile broadband* maupun *fixed broadband*. Selain itu, keterkaitan jasa komunikasi Indonesia pada rantai nilai global juga masih relatif rendah.

Terkait perdagangan internasional, pemerintah di berbagai negara semakin meningkatkan keterlibatannya dalam perjanjian perdagangan internasional, termasuk pada sektor jasa seperti dalam kerja sama multilateral WTO, kerja sama regional (ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS 1-10), ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) – Enhancement AFAS, ASEAN Movement of Natural Persons (MNP) Agreement, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN + 1 FTA Partners (ASEAN + Korea FTA, ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Jepang CEPA, ASEAN-Hong Kong FTA), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC nonbinding), dan juga kerja sama bilateral seperti Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), Indonesia European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEFTA-CEPA), dan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Sektor jasa komunikasi merupakan sektor jasa yang strategis dalam tiap perundingan perdagangan internasional sehingga banyak negara yang menginginkan adanya keterbukaan pada sektor jasa ini. Guna menjaga keseimbangan, pemerintah perlu mengidentifikasi daya saing dan informasi lainnya atas sektor jasa komunikasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, buku informasi jasa komunikasi ini disusun dengan harapan agar memberikan gambaran mengenai sektor jasa komunikasi beserta isu perundingan perdagangan jasa komunikasi yang dihadapi oleh Indonesia dan upaya-upaya agar kepentingan nasional tetap terlindungi.

1.2 Profil Perdagangan Sektor Jasa Komunikasi Indonesia

Berdasarkan klasifikasi sektoral jasa WTO W/120, sektor jasa komunikasi diklasifikasikan menjadi lima subsektor sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Table 1. Cakupan Jasa Komunikasi

Subsektor	CPC
A. Jasa Pos	7511
B. Jasa Kurir	7512
C. Jasa Telekomunikasi	7521, 7522, 7523**, 7529**, 843**
D. Jasa Audiovisual	9611, 9612, 9613, 7524
E. Lainnya	

Jasa Telekomunikasi

Klasifikasi untuk subsektor jasa telekomunikasi dibagi menjadi 15 sub-subsektor jasa, antara lain:

Tabel 2. Cakupan Subsektor Jasa Telekomunikasi

Sub-subsektor	CPC
Voice telephone services	7521
Packet-switched data transmission services	7523**
Circuit-switched data transmission services	7523**
Telex services	7523**
Telegraph services	7522
Facsimile services	7521**+7529**
Private leased circuit services	7522**+7523**
Electronic mail	7523**
Voice mail	7523**
On-line information and data base retrieval	7523**
electronic data interchange (EDI)	7523**
enhanced/value-added facsimile services, incl. store and forward, store and retrieve	7523**
code and protocol conversion	n.a.
on-line information and/or data processing (incl.transaction processing)	843**
Other	

** The (**) indicates that the service specified constitutes only a part of the total range of activities covered by the CPC concordance (e.g. voice mail is only a component of CPC item 7523).

Jasa Audiovisual

Klasifikasi untuk subsektor jasa audiovisual dibagi menjadi 6 sub-subsektor jasa, antara lain:

Tabel 3. Cakupan Subsektor Jasa Audiovisual

Sub-subsektor	CPC
Motion picture and video tape production and distribution services	9611
Motion picture projection service	9612
Radio and television services	9613
Radio and television transmission services	7524
Sound recording	n.a.
Other	

Potensi Ekspor dan Impor Jasa Telekomunikasi

Dalam kajian World Bank yang bekerjasama dengan Dit Perundingan Perdagangan Jasa tahun 2016 dengan judul “Analisis Penawaran Dan Permintaan Sektor Jasa Dalam Perekonomian Nasional”, secara umum sektor Jasa komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, antara lain:

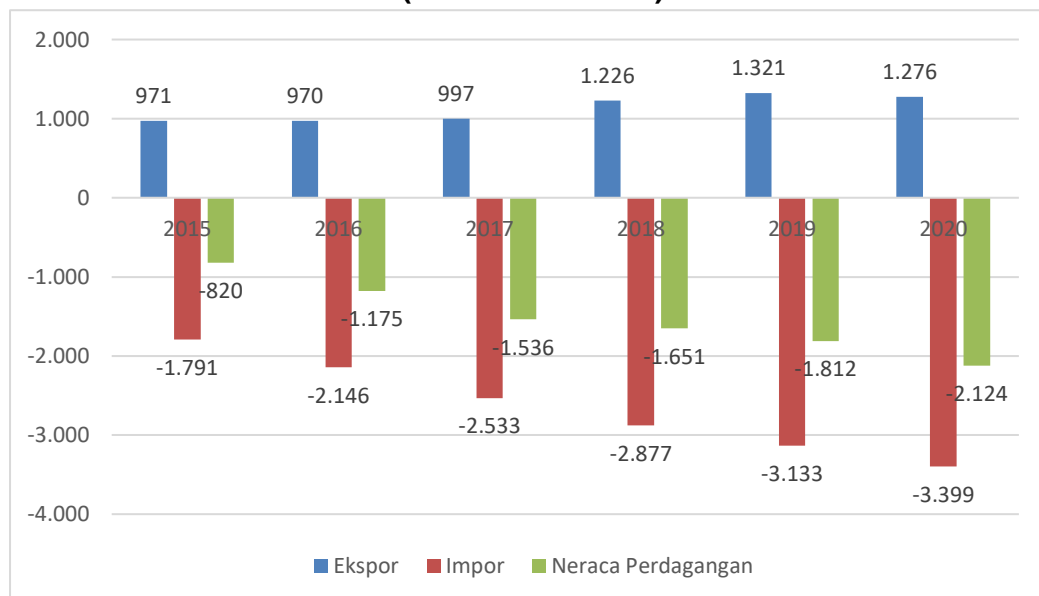
1. Secara total, jasa komunikasi memiliki kelebihan permintaan sebesar 0.24%. Hal ini mengindikasikan bahwa jasa komunikasi hanya mampu memasok 99,76% dari kebutuhan domestik.
2. Di tingkat subsektor, jasa komunikasi dan jasa pos dan kurir memiliki kelebihan penawaran, masing-masing sebesar 1.1% dan 11,5%. Dari sisi penawaran mengindikasikan bahwa ketiga subsektor jasa tersebut memiliki potensi untuk ekspansi ke pasar luar negeri. Untuk fasilitasi ekspansi pasar salah satunya dapat dilakukan melalui FTA/CEPA dengan pembukaan akses pasar sektor dimaksud.
3. Namun demikian untuk jasa penyiaran dan pemrograman, film dan hasil perekaman suara masih memiliki kelebihan permintaan sebesar 12,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa jasa penyiaran dan pemrograman, film dan hasil perekaman hanya mampu memasok 87,7% dari kebutuhan domestik.
4. Dari sisi multiplier effect, jasa komunikasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap output maupun sektor lainnya. Jasa komunikasi memiliki penganda output sebesar 1,6. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan permintaan output jasa komunikasi sebesar satu satuan (misal, Rp. 1) akan meningkatkan output perekonomian

secara keseluruhan (output jasa komunikasi sendiri dan sektor lain yang terkait) sebesar 1,6 satuan (Rp. 1,6).

5. Jasa komunikasi memiliki forward linkage (keterkaitan kedepan) tinggi sebesar 1,9, namun memiliki backward linkage (keterkaitan kebelakang) yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan permintaan output sektor ini kurang berpengaruh terhadap peningkatan sektor domestik yang sebagai input sektor tersebut. Kemungkinan dikarenakan sektor ini banyak menggunakan input impor. Namun demikian peningkatan permintaan output sektor ini akan meningkatkan output sektor penggunanya.

Berdasarkan data statistik dari Bank Indonesia, total ekspor jasa komunikasi dari tahun 2015 hingga 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, begitu pula dengan total impor juga mengalami peningkatan sehingga neraca perdagangan sektor jasa komunikasi (trade balance) mengalami defisit dalam jangka waktu tahun tersebut.

Tabel 4
Ekspor-Impor Jasa Komunikasi
(dalam Juta USD)



Berdasarkan data di atas, fasilitasi melalui FTA/CEPA berpotensi memberikan keuntungan terhadap sektor jasa komunikasi, melalui 2 saluran berikut:

- a. Sisi penawaran: Jasa yang memiliki kelebihan penawaran difasilitasi peningkatan akses pasar di negara mitra FTA/CEPA sehingga dapat mendorong peningkatan ekspor jasa komunikasi;

- b. Sisi input: rendahnya nilai backward linkage mengindikasikan bahwa jasa komunikasi banyak menggunakan input impor. Input impor berkualitas dikarenakan belum mampu dipasok oleh penyedia jasa domestik dapat difasilitasi dengan pembukaan akses pasar domestik khusus input impor tersebut sehingga jasa komunikasi dapat mendapatkan input yang berkualitas dengan harga relatif lebih murah sehingga dapat meningkatkan daya saingnya.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Visi Pembangunan Nasional untuk periode 2005-2025 adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah transformasi struktur dalam perdagangan jasa. Jasa dan sektor-sektor terkait jasa mempunyai potensi yang sangat penting dalam upaya mempercepat pencapaian visi pembangunan dimaksud mengingat jasa dan sektor-sektor terkait jasa memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian Indonesia. Dalam struktur PDB nasional, jasa memiliki peranan yang besar dengan tren yang meningkat.

Pada tahun 2000, kontribusi jasa terhadap pembentukan PDB sebesar 45% dan meningkat menjadi 55% pada tahun 2014. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, jasa dan sektor terkait jasa mampu menyerap 60 juta tenaga kerja (55% dari total tenaga kerja) pada tahun 2016. Dari total *output* jasa, 34% diantaranya digunakan sebagai permintaan antara (*input* antara) dalam suatu aktivitas produksi. Salah satu upaya dalam meningkatkan ketersediaan sektor jasa sebagai *input* antara dalam rangka menstimulus pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilakukan dengan menurunkan hambatan perdagangan.

BAB II

SEKTOR JASA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

2.1 Sektor Jasa dalam RPJMN

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dipaparkan beberapa tahapan rencana pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Selama lima tahun ini, daya saing perekonomian diharapkan semakin kompetitif dan berkembang dengan adanya integrasi bidang industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, serta sektor jasa. Masyarakat Indonesia pada periode ini juga diharapkan dapat hidup dengan layak dengan diselenggarakannya jaringan transportasi, telekomunikasi dan informatika, elektrifikasi, sanitasi dan air bersih, serta irigasi yang andal.

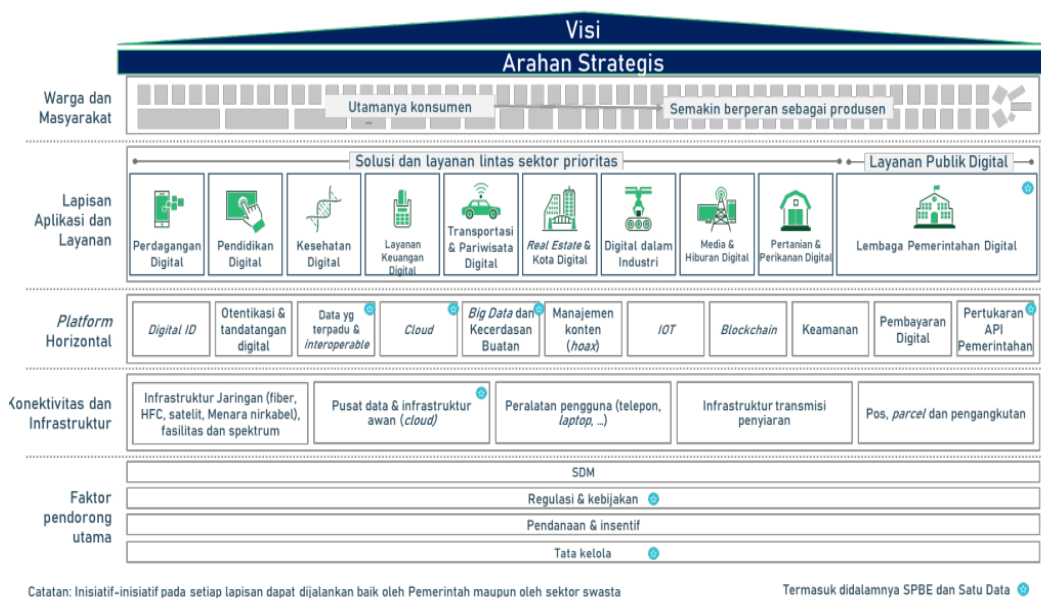
Pemerintah berharap pertumbuhan Indonesia pada periode 2020 – 2024 dapat kembali meningkat di angka rata-rata 5,4 – 6,03% per tahun, diikuti dengan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 3 – 5%. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa sendiri berada di angka rata-rata 5,3 – 7,7% per tahun. Sementara itu, pertumbuhan impor barang dan jasa berada di angka rata-rata 5,6 – 7,2% per tahun. Pertumbuhan impor tersebut didorong oleh adanya peningkatan permintaan domestik, terutama dari segi investasi. Neraca perdagangan Indonesia diharapkan dapat mengalami perbaikan defisit transaksi berjalan menjadi 2,3 – 1,7% PDB dan terjadi peningkatan cadangan devisa menjadi USD131,1 – 155,8 miliar pada tahun 2024.

Untuk mendukung tercapainya realisasi dari RPJMN, Presiden Joko Widodo memberikan arahan berupa percepatan agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital.

Salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi yang memadai adalah masih banyaknya desa yang tidak terlayani akses telekomunikasi dan internet, mencapai 4.474 desa. Ketidaktersediaan

akses telekomunikasi dan internet di daerah berpenduduk dapat menghambat pembangunan secara keseluruhan. Akses telekomunikasi dan internet menjadi sarana penyampaian dan pengumpulan informasi yang efektif sehingga layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih optimal. Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan akses internet layanan kesehatan melalui telemedicine untuk mendukung layanan pasien yang lebih efektif, sekaligus menunjang kelancaran proses administrasi dan operasional.

Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional



Di sektor pendidikan TIK khususnya akses internet juga telah menjadi salah satu kebutuhan untuk mewujudkan terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas dan efektif. Tidak adanya akses internet berpotensi mengganggu efektivitas proses pembelajaran seperti tidak dapat terselenggaranya ujian berbasis komputer hingga keterbatasan guru dalam mengakses bahan ajar yang tersedia di internet.

Peran TIK menjadi semakin besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hampir seluruh aspek perekonomian telah mengandalkan TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatannya. Infrastruktur TIK Indonesia masih perlu dibenahi untuk dapat memaksimalkan penggunaan TIK. Salah satu sarana akses internet yang andal adalah fixed broadband. Di negara maju, fixed broadband berperan penting dalam kegiatan perekonomian. Jumlah pelanggan fixed broadband

di Indonesia masih sangat rendah yaitu pada angka 2 persen, jauh dibawah rata-rata dunia 12,4 persen.

Selain itu tingkat kecepatan jaringan fixed broadband di Indonesia juga masih rendah yaitu sekitar 13,8 Mbps jauh dibawah rata-rata dunia 42,71 Mbps. Hal ini tentunya akan berdampak tidak maksimalnya peran TIK dalam percepatan perekonomian Indonesia. Lambatnya kecepatan jaringan tidak hanya terjadi pada fixed broadband. Tingkat kecepatan jaringan mobile broadband di Indonesia juga masih tergolong lambat, yaitu 9,8 Mbps sedangkan rata-rata dunia berada pada 22,16 Mbps. Hal ini menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah-daerah yang masih belum terjangkau akses layanan tetap (fixed broadband).

Keberhasilan pembangunan infrastruktur maupun pemanfaatan dan pengembangan ekosistem TIK tidak terlepas dari tersedianya faktor pendukung (enabler) lainnya. Pemanfaatan perkembangan teknologi Big Data, AI, IoT harus dapat memberikan manfaat yang paling besar serta mengendalikan efek disrupsi yang dapat dimitigasi. Adopsi teknologi tersebut berakibat akan semakin banyaknya perangkat yang saling terkoneksi dan diprediksi pada 2020 diperkirakan 20 miliar perangkat akan saling terkoneksi melalui internet (Gartner, 2017). Untuk itu, keamanan informasi harus menjadi perhatian utama karena potensi gangguan keamanan terhadap perangkat dan sistem yang ada masih tergolong tinggi. Kontribusi industri TIK dalam negeri juga harus diperkuat dalam menyongsong era transformasi digital. Kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perangkat elektronik menjadi prasyarat untuk meningkatkan kapasitas industri TIK. Berbagai kebijakan lain seperti insentif fiskal dan insentif pasar yang saling terkoordinasi lintas sektor juga harus disusun untuk dapat memperkuat berbagai level industri TIK.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan ini sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Peningkatan kapasitas penyedia jasa Indonesia, harmonisasi regulasi sektor jasa, penyediaan statistik perdagangan jasa, serta peningkatan daya saing merek jasa Indonesia diharapkan dapat menjadi strategi dalam meningkatkan dan memperluas pasar ekspor pelaku jasa domestik.

BAB III

KOMITMEN UNILATERAL DAN KOMITMEN PERDAGANGAN INTERNASIONAL SERTA OFFER SEKTOR JASA KOMUNIKASI

3.1 Peraturan Domestik Mengenai Jasa Komunikasi

Peraturan domestic dalam perdagangan merupakan hal penting guna menciptakan antara lain kepastian hukum, transparansi serta non diskriminasi bagi penyedia jasa, dalam hal ini terkait dengan perdagangan jasa sektor jasa komunikasi. Peraturan domestik yang ada terdiri dari berbagai perangkat hukum, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis di sektor jasa tersebut.

3.1.1 UU Perdagangan dan UU terkait

No.	Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Nama Peraturan
1	Undang-Undang	UU No. 7 Tahun 2014	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2	Undang-Undang	UU No. 36 Tahun 1999	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
3	Undang-Undang	UU No. 5 Tahun 1999	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat
4	Undang-Undang	UU No. 38/2009	UU No. 38/2009 Tentang Pos
5.	Undang-Undang	UU No.32 Tahun 2002	UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
6.	Undang-Undang	UU No. 33/2009	UU No. 33/2009 Tentang Perfilman

3.1.2 Peraturan Sektoral Jasa di masing-masing sektor

No.	Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Nama Peraturan
1.	PERATURAN PEMERINTAH	PP NO. 52 TAHUN 2000	Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
		PP No. 46 Tahun 2021	Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
2.	PERATURAN PRESIDEN	PERPRES NO. 10 TAHUN 2021	Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
3.	KEPUTUSAN MENTERI	KM 72 TAHUN 1999	Keputusan Menteri 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia
		KM 30 TAHUN 2004	Keputusan Menteri 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
4.	PERATURAN MENTERI	PERMENKOMINFO NOMOR: 13/P/M.KOMINFO/8/2005	Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit
		PERMENKOMINFO NOMOR: 18/PER/M.KOMINFO/9/2005	peraturan Menteri Kominfo Nomor: 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi

No.	Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Nama Peraturan
			Pemerintah Dan Badan Hukum
		PERMENKOMINFO NOMOR: 05/PER/M.KOMINFO /I/2006	Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/I/2006 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi
		PERMENKOMINFO NOMOR: 37/P/M.KOMINFO/12 /2006	Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2006 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit
		PERMENKOMINFO NOMOR: 40/P/M.KOMINFO/12 /2006	Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 40/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
		PERMENKOMINFO NOMOR: 30/PER/M.KOMINFO /8/2009	Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (<i>Internet Protocol Television / IPTV</i>) Di Indonesia

No.	Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Nama Peraturan
		PERMENKOMINFO NOMOR: 19/PER/M.KOMINFO /03/2009	Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2 009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
		PERMENKOMINFO NOMOR: 01/PER/M.KOMINFO /01/2010	Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2 010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
		PERMENKOMINFO NOMOR: 19/PER/M.KOMINFO /12/2010	Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/12/2 010 tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:48/PER/M.KOMINF O/11/2009 tentang Penyediaan Jas Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
		PERMENKOMINFO NOMOR: 16 /PER/M.KOMINFO/1 0 /2010	Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 16/PER/M.KOMINFO/10 /2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/20 07 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

No.	Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Nama Peraturan
		PERMENKOMINFO NO. 15 TAHUN 2018	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 15 Tahun 2018 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
		PERMENKOMINFO NO. 13 TAHUN 2019	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
		PERMENKOMINFO NO. 2 TAHUN 2020	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
		PERMENKOMINFO NO. 1 TAHUN 2021	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
		PERMENKOMINFO NO. 3 TAHUN 2021	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan

No.	Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Nama Peraturan
			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, Dan Sistem Dan Transaksi Elektronik
		PERMENKOMINFO NO. 5 TAHUN 2021	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

3.2 Komitmen dan Offer Sektor Jasa Komunikasi di Berbagai Fora

Di dalam sebuah perundingan internasional, negara-negara yang terlibat di dalamnya akan melakukan request dan offer dalam sebuah perjanjian internasional. Dalam hal ini, Indonesia telah memberikan komitmen dan offernya di berbagai fora perundingan internasional sebagai bentuk liberalisasi di sektor jasa komunikasi. Fora perundingan yang diikuti Indonesia untuk sektor jasa komunikasi yaitu WTO, AFAS 10, IECEPA, RCEP, IACEPA, AANZFTA, AJCEP, IJEPA, AKFTA, AIFTA, IKCEPA. Adapun komitmen tersebut pada fora perundingan internasional sebagai berikut.

A. WTO

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
All Sub-sectors			(i) Indonesia undertakes additional commitments as per reference paper attached (ii) The foreign service supplier must be a world class operator with extensive international experience.

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
			(iii) Type approval mechanism is in place (iv) Basic telecommunication service tariff is decided by the government;
<p>Local service:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Public switched telephone service (CPC 7521) -Circuit switched public data network services (CPC 7523**) - Teleconferencing services (CPC 75292) 	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Local services are provided exclusively by PT Telkom and 5 regional joint operation scheme operators.</p> <p>Type of legal entity required:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joint venture, - Joint operation, or - Contract management <p>Foreign equity participation is limited to 35 per cent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert for a JVC is limited to 20 persons</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>The period of exclusivity for local services expires in 2011. The Government will conduct a review of policy with respect to whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period.</p>

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>Long distance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Public switched telephone service (CPC 7521) - Circuit switched public data network services (CPC 7523**) - Teleconferencing services (CPC 75292) 	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Long distance services are provided by PT Telkom exclusively</p> <p>Type of legal entity required:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joint venture - Joint operation or - Contract management <p>Foreign equity participation is limited to 35 per cent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert for a JVC is limited to 20 persons.</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>The period of exclusivity for long distance services expires in 2006. The Government will conduct a review of policy with respect to whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period.</p>
<p>International:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Public switched telephone service (CPC 7521) - Circuit switched public 	<p>1) Only through networks of PT Indosat and PT Satelindo. Callback is not permitted.</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>The period of exclusivity for international services expires in 2005. The Government will conduct a review of policy with respect to whether to permit additional suppliers of</p>

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>data network services (CPC 7523**)</p> <p>- Teleconferencing services (CPC 75292)</p>	<p>2) Callback is not permitted.</p> <p>3) International services are provided exclusively by PT Indosat and PT Satelindo (duopoly).</p> <p>Type of legal entity required:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joint venture - Joint operation or - Contract management <p>Foreign equity participation is limited to 35 per cent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons.</p>		<p>such services upon the expiry of this period</p>
<p>Packet-switched public data network services (CPC 7523**)</p> <p>- X. 25</p> <p>- Frame relay</p> <p>- Local</p>	<p>1) Only through networks of PT Indosat and PT Satelindo</p> <p>2) None</p> <p>3) Three service suppliers are</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>- Local distance</p> <p>- International</p>	<p>now operating on a non-exclusive basis</p> <p>Type of legal entity required:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joint venture or - Joint operation <p>Foreign equity participation is limited to 35 per cent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons.</p>		
<p>Telex services</p>	<p>1) Only through networks of PT Indosat and PT Satelindo</p> <p>2) None</p> <p>3) Type of legal entity required:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joint venture or - Joint operation <p>Foreign equity participation is</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) Foreign service supplier should be a world class operator.</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<p>limited to 35 per cent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert limited to 20 persons.</p>		
Telegraph services	<p>1) Only through networks of PT Indosat and PT Satelindo</p> <p>2) None</p> <p>3) Type of legal entity required: - Joint venture or - Joint operation</p> <p>Foreign equity participation is limited to 35 per cent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert limited to 20 persons</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) Foreign service supplier should be a world class operator.</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	
Domestic: Mobile cellular telephone services (CPC 75213)	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Seven operators are</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<p>now providing service</p> <p>Type of legal entity required: Joint venture</p> <p>Foreign equity participation is limited to 35 per cent</p> <p>4) Natural person for management and technical expert for a JVC is limited to 20 persons</p>	<p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	
<p>Domestic: Personal Mobile Cellular Communication Services</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) New entry only through a joint venture with state-owned company</p> <p>Foreign equity participation is limited to 35 per cent</p> <p>4) Natural person for management and technical expert for a JVC is limited to 20 persons.</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Internet Access Services	<p>1) Until 2005, only through networks of PT Indosat and PT Satelindo for international access</p> <p>2) None</p> <p>3) More than 30 licences have been issued</p> <p>Type of legal entity required:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joint venture or - Joint operation <p>Foreign equity participation is limited to 35 per cent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert limited to 20 persons</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	
Domestic: Regional and National Paging Services (CPC 75291)	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Currently there are 10 national operators and</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<p>over 70 local operators.</p> <p>Type of legal entity required</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joint venture or - Joint operation <p>Foreign equity participation is limited to 35 per cent</p> <p>4) Natural person for management and technical expert limited to 20 persons</p>		
<p>Domestic: Public payphone services</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) Provision and management of terminal equipment for public payphone services are now carried out by several local companies. <p>Type of legal entity required:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joint venture, 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Unbound 2) Unbound 3) None 4) As specified in the Horizontal Measures 	<p>Division of revenue between the payphone operator and PT Telkom is determined by the government</p>

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<ul style="list-style-type: none"> - Joint operation, or - Contract management <p>Foreign equity participation is limited to 35 per cent.</p> <p>4) Natural person for management and technical expert limited to 20 persons</p>		
<p>Voice mail service (CPC 7523)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) Access granted for five foreign service providers, in addition to existing companies 4) Unbound except for director and technical expert 	<ul style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4) As specified in the Horizontal Measures 	
<p>Electronic mail services (CPC 75232)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) Access granted for five foreign service 	<ul style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) Higher paid-up capital is required of 	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<p>provider companies, in addition to existing companies</p> <p>4) Unbound except for director and technical expert</p>	<p>foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	
Computer time sharing services (CPC 84330)	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies</p> <p>4) Unbound except for director and technical expert</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	
Videotex services (CPC 75299)	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Access granted for five foreign service provider companies, in addition to</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<p>existing companies</p> <p>4) Unbound except for director and technical expert</p>	<p>measure will be eliminated in the year 2020.</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	
<p>Electronic mail box (CPC 75232)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies</p> <p>4) Unbound except for director and technical expert</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.</p> <p>4) As specified in the Horizontal Measures</p>	
<p>File transfer services (CPC 75299)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	4) Unbound except for director and technical expert	4) As specified in the Horizontal Measures	
Home telemetering alarm (CPC 75299)	1) None 2) None 3) Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies 4) Unbound except for director and technical expert.	1) None 2) None 3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4) As specified in the Horizontal Measures	
Entertainment services (CPC 75299)	1) None 2) None 3) Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies 4) Unbound except for director and technical expert	1) None 2) None 3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4) As specified in the Horizontal Measures	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Management information services (CPC75299)	1) None 2) None 3) Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies 4) Unbound except for director and technical expert	1) None 2) None 3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4) As specified in the Horizontal Measures	

B. AFAS 10

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Courier Services (CPC 7512)	(1) None (2) None (3) Joint venture with foreign equity participation up to 49%	(1) None (2) None (3) Allowed to established within a provincial capital, that has had an international airport and/or seaport	
Telecommunication Services			
Voice Telephone Services (CPC 7521)	(1) None (2) None (3) Joint venture with foreign equity	(1) None (2) None (3) None	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	participation up to 49%		
Public local telephone services (CPC 75211) Fixed wireline access technology only	(1) None (2) None (3) Aggregate foreign equity participation is permitted up to 70% provided that: up to 49% through foreign direct investment and the remaining percentage through other mechanisms.	(1) None (2) None (3) Services shall be provided in certain provinces and or necessary areas	
Packet-switched data transmission services (CPC 7523**)	(1) None (2) None (3) Joint venture with foreign equity participation up to 49%.	(1) None (2) None (3) None	
Packet-switched data transmission services (CPC 7523**) Only in underserved area as specified in domestic regulations	(1) None (2) None (3) Joint venture with foreign equity participation up to 70%.	(1) None (2) None (3) Only in underserved area as specified in domestic regulations	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Circuit-switched data transmission services (CPC 7523**)	(1) None (2) None (3) Aggregate foreign equity participation is permitted up to 70% provided that: up to 49% through foreign direct investment and the remaining percentage through other mechanisms.	(1) None (2) None (3) None	
Telex Services Telegraph Services Facsimile (CPC 7521** + 7529**)	(1) None (2) None (3) Joint venture with foreign equity participation up to 70 %	(1) None (2) None (3) None	
Private leased circuit services (CPC 7522** + 7523**)	(1) None (2) None (3) Joint venture with foreign equity participation up to 49%.	(1) None (2) None (3) None	
Dedicated network services (CPC 75222)	(1) None (2) None (3) Aggregate foreign equity participation is permitted up to 70% provided that:	(1) None (2) None (3) Services shall be provided in certain provinces and or necessary areas	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	up to 49% through foreign direct investment and the remaining percentage through other mechanisms.		
<p>Electronic mail services (CPC 75232)</p> <p>Electronic mail box (CPC 75232)</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Aggregate foreign equity participation is permitted up to 70% provided that: up to 49% through foreign direct investment and the remaining percentage through other mechanisms.</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) None</p>	
<p>Voice mail services (CPC 7523)</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Aggregate foreign equity participation is permitted up to 70% provided that: up to 49% through foreign direct investment and the remaining percentage through other mechanisms.</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) None</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
On-line information and database retrieval (CPC 7523**)	(1) None (2) None (3) Joint venture with aggregate foreign equity participation up to 70% provided that: up to 51% through foreign direct investment and the remaining percentage through other mechanisms	(1) None (2) None (3) None	
Electronic data interchange (EDI) (CPC 7523**)	(1) None (2) None (3) Aggregate foreign equity participation is permitted up to 70% provided that: up to 49% through foreign direct investment and the remaining percentage through other mechanisms.	(1) None (2) None (3) None	
Enhanced/ value added facsimile services, including store and forward, store and retrieve	(1) None (2) None (3) Aggregate foreign equity participation is permitted up to 70% provided that:	(1) None (2) None (3) None	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
(CPC 7523**)	up to 49% through foreign direct investment and the remaining percentage through other mechanisms.		
Code and protocol conversion	(1) None (2) None (3) Aggregate foreign equity participation is permitted up to 70% provided that: up to 49% through foreign direct investment and the remaining percentage through other mechanisms.	(1) None (2) None (3) None	
On-line information and or data processing (including transaction processing) (CPC 843**)	(1) None (2) None (3) Joint venture with aggregate foreign equity participation up to 70% provided that: up to 49% through foreign direct investment and the remaining percentage through other mechanisms	(1) None (2) None (3) None	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Local services: c) Teleconferencing Services (CPC 75292)	(1) None (2) None (3) Joint venture with foreign equity participation up to 49%.	(1) None (2) None (3) None	
Long Distance and International: Services: Teleconferencing Services (CPC 75292)	(1) None (2) None (3) Joint venture with foreign equity participation up to 49%	(1) None (2) None (3) None	
Regional and National Paging Service (CPC 75291)	(1) None (2) None (3) Joint venture with foreign equity participation up to 70%.	(1) None (2) None (3) None	
Internet Access Services	(1) None (2) None (3) Joint venture with foreign equity participation up to 49%.	(1) None (2) None (3) None	
Computer time sharing services (CPC 84330) Video text services (CPC 75299)	(1) None (2) None (3) Joint venture with foreign equity participation up to 70%.	(1) None (2) None (3) None	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
File transfer services (CPC 75299)	(1) None	(1) None	
Home telemetering alarm (CPC 75299)	(2) None	(2) None	
Entertainment services (CPC 75299)	(3) Joint venture with foreign equity participation up to 70%.	(3) None	
Management information services (CPC 75299)			
Audiovisual Services			
Motion picture and video tape production and distribution services (CPC 9611)	(1) None	(1) None	
Motion picture projection service (CPC 9612)	(2) None	(2) None	
Sound Recording (n.a.)	(3) Joint venture with foreign equity participation up to 70%.	(3) None	
Other colour correction services, i.e	(1) None	(1) None	
	(2) None	(2) None	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
adding, modifying, or excluding colour of audiovisual works (produced on film, video, or digital media, etc.) electronically, using digital techniques	(3) Joint venture with foreign equity participation up to 70%.	(3) Subject to Qualification and Licensing requirement and procedure including registration	

C. IECEPA

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
C. Telecommunication Services All Sub-sectors			(i) The foreign service supplier must be a world class operator with extensive international experience. (ii) Type approval mechanism is in place. (iii) Basic telecommunication service tariff is decided by the government.
Local service: - Public switched telephone	1) None 2) None	1) Unbound 2) Unbound 3) None	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>service (CPC 7521)</p> <p>- Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)</p> <p>- Teleconferencing Services (CPC 75292)</p>	<p>3) None except commercial presence only permitted in the form of:</p> <p>a) Joint operation by establishing a representative office;</p> <p>b) Joint venture company with foreign equity participation up to 35%; or</p> <p>c) Contract management.</p> <p>4) Unbound except for managers and specialists for a joint venture company is limited to 20 persons</p>	<p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	
<p>Long Distance:</p> <p>- Public switched telephone service (CPC 7521)</p> <p>- Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)</p> <p>- Teleconferenci</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except commercial presence only permitted in the form of:</p> <p>a) Joint operation by establishing a representative office;</p> <p>b) Joint venture company with foreign equity</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
ng Services (CPC 75292)	<p>participation up to 35%; or</p> <p>c) Contract management.</p> <p>4) Unbound except for managers and specialists for a joint venture company limited to 20 persons</p>		
<p>International:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Public switched telephone service (CPC 7521) - Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**) - Teleconferencing Services (CPC 75292) 	<p>1) Only through available networks</p> <p>2) None</p> <p>3) None except commercial presence only permitted in the form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Joint operation by establishing a representative office; b) Joint venture company with foreign equity participation up to 35%; or c) Contract management. <p>4) Unbound except for managers and specialists for a joint venture company limited to 20 persons</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Packet-switched public data network services (CPC 7523**) <ul style="list-style-type: none"> - X. 25 - Frame relay - Local - Local distance - International 	1) Only through available networks 2) None 3) None except commercial presence only permitted in the form of: <ul style="list-style-type: none"> a) Joint operation by establishing a representative office; or b) Joint venture company with foreign equity participation up to 35%. 4) Unbound except for managers and specialists for a joint venture company limited to 20 persons	1) Unbound 2) Unbound 3) None 4) Unbound except as indicated in the horizontal section	
Telex Services	1) Only through available networks 2) None 3) None except commercial presence only permitted in the form of: <ul style="list-style-type: none"> a) Joint operation by establishing a representative office; or 	1) Unbound 2) Unbound 3) None except foreign service supplier should be a world class operator 4) Unbound except as indicated in the horizontal section	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<p>b) Joint venture company with foreign equity participation up to 35%.</p> <p>4) Unbound except for manager and specialist for a joint venture company limited to 20 persons</p>		
Telegraph Services	<p>1) Only through available networks</p> <p>2) None</p> <p>3) None except commercial presence only permitted in the form of:</p> <p>a) Joint operation by establishing a representative office; or</p> <p>b) Joint venture company with foreign equity participation up to 35%.</p> <p>4) Unbound except for manager and specialist for a joint venture company limited to 20 persons</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None except foreign service supplier should be a world class operator</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Domestic: Mobile Cellular Telephone Services (CPC 75213)	1) None 2) None 3) None except joint venture company with foreign equity participation up to 67% 4) Unbound except for manager and specialist for a joint venture company limited to 20 persons	1) Unbound 2) Unbound 3) None 4) Unbound except as indicated in the horizontal section	
Domestic: Personal Mobile Cellular Communication Services	1) None 2) None 3) None except joint venture company with foreign equity participation up to 67% 4) Unbound except for manager and specialist for a joint venture company limited to 20 persons	1) Unbound 2) Unbound 3) None 4) Unbound except as indicated in the horizontal section	
Internet Access Services	1) None 2) None 3) None except commercial presence only	1) Unbound 2) Unbound 3) None 4) Unbound except as indicated in the horizontal section	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<p>permitted in the form of:</p> <p>a) Joint operation by establishing a representative office; or</p> <p>b) Joint venture company with foreign equity participation up to 35%.</p> <p>4) Unbound except for manager and specialist for a joint venture company limited to 20 persons</p>		
<p>Domestic: Regional and National Paging Service (CPC 75291)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except commercial presence only permitted in the form of:</p> <p>a) Joint operation by establishing a representative office; or</p> <p>b) Joint venture company with foreign equity participation up to 35%.</p> <p>4) Unbound except for manager and specialist for a joint</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	venture company limited to 20 persons		
Domestic: Public Payphone Services	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except commercial presence only permitted in the form of:</p> <p>a) Joint operation by establishing a representative office;</p> <p>b) Joint venture company with foreign equity participation up to 35%; or</p> <p>c) Contract management.</p> <p>4) Unbound except for manager and specialist for a joint venture company limited to 20 persons</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) None</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	Division of revenue between the payphone operator and PT Telkom is determined by the government.
Voice mail services (CPC 7523)	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except access granted for five foreign service provider companies, in</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<p>addition to existing companies</p> <p>4) Unbound except for directors and specialists</p>	<p>domestic service suppliers</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	
<p>Electronic mail services (CPC 75232)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies</p> <p>4) Unbound except for directors and specialists</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	
<p>Electronic mail box (CPC 75232)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies</p> <p>4) Unbound except for directors and specialists</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	
<p>Computer time sharing services (CPC 84330)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except access granted for five foreign service</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except higher paid-up capital is required of</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<p>provider companies, in addition to existing companies</p> <p>4) Unbound except for director and specialist</p>	<p>foreign service suppliers than of domestic service suppliers</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	
<p>Video text services (CPC 75299)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies</p> <p>4) Unbound except for director and specialist</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	
<p>File transfer services (CPC 75299)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies</p> <p>4) Unbound except for director and specialist</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	
<p>Home telemetering alarm</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
(CPC 75299)	<p>3) None except access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies</p> <p>4) Unbound except for director and specialist</p>	<p>3) None except higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	
<p>Entertainment services (CPC 75299)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies</p> <p>4) Unbound except for director and specialist</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	
<p>Management information services (CPC 75299)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies</p> <p>4) Unbound except for director and specialist</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	

D. RCEP

List A

Sector	:	Communication Services
Subsector	:	(a) Postal Services (CPC 75111 and CPC 75112) (Indonesia Standard Industrial Classification 2015, Code 53102-Commercial Postal) excluding Intercity Delivery and Universal Post Services (b) Courier Services (CPC 75121) (Indonesia Standard Industrial Classification 2015, Code 53102-Commercial Postal) excluding Intercity Delivery and Universal Post Services
Level of Government	:	Central
Type of Obligation	:	National Treatment (Article 8.4) Market Access (Article 8.5)
Description of Measure	:	<u>Trade in Services</u> Foreign service suppliers are not permitted to establish a commercial presence in Indonesia to supply postal or courier services, except through a joint venture with only one Indonesian postal service supplier with foreign equity participation not exceeding 49 per cent. The Indonesian joint venture partner must be wholly owned by Indonesian nationals. The joint venture may only operate within a provincial capital that has an international airport or seaport and is prohibited from providing postal and courier services between cities in Indonesia.
Source of Measure	:	<i>Law No. 38 of 2009 concerning Postal</i>

List B

Sector	:	Telecommunication Services
Subsector	:	(a) Public Switched Telephone Service (CPC 7521) (b) Teleconferencing Services (CPC 75292) (c) Mobile Cellular Telephone Services (CPC 75213) (d) Internet Access Services Regional and National Paging Services (CPC 75291)

		(e) Public Payphone Services Voice Mail Service (CPC 7523) (f) Electronic Mail Services (CPC 75232)
Type of Obligation	:	National Treatment (Article 8.4) Market Access (Article 8.5)
Description	:	<u>Trade in Services</u> Indonesia reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to trade in services as defined in subparagraph (r)(iii) of Article 8.1 (Definitions) that requires supply through commercial presence to be in the form of joint venture with no more than 35 per cent of the equity participation in a joint venture to be owned by foreigners.

Sector	:	Telecommunication Services
Subsector	:	(a) Videotext Services (CPC 75229) (b) File Transfer Services, Home Telemeter Alarm, Entertainment Services, Management Information Services (CPC 75299) (c) Computer Time Sharing Services (CPC84330)
Type of Obligation	:	National Treatment (Article 8.4) Market Access (Article 8.5)
Description	:	<u>Trade in Services</u> Indonesia reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to trade in services as defined in subparagraph (r)(iii) of Article 8.1 (Definitions) that require supply through commercial presence to be in the form of joint venture subject to the following conditions: (a) no more than 35 per cent of the equity participation in a joint venture shall be owned by foreigners; (b) supply of services in certain provinces or areas are subject to an economic needs test; (c) services shall be provided only for closed user group; and (d) the network service supplier is prohibited to connect to other networks for greater certainty, cross-border supply of service is permitted.

Sector	:	Telecommunication Services
Subsector	:	Electronic Data Interchange (EDI) (CPC 7523**)
Type of Obligation	:	National Treatment (Article 8.4) Market Access (Article 8.5)
Description	:	<p><u>Trade in Services</u></p> <p>Indonesia reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to trade in services as defined in subparagraph (r)(iii) of Article 8.1 (Definitions) that requires supply through commercial presence to be in the form of joint venture subject to aggregate foreign equity participation requirement permitted up to 70 per cent provided that: up to 49 per cent through foreign direct investment and the remaining percentage through other mechanisms.</p>

Sector	:	Telecommunication Services
Subsector	:	<p>(a) Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)</p> <p>(b) Packet-switched public data network services (CPC 7523**)</p> <p>(c) Private Leased Circuit Services (CPC 7522**+7523**)</p> <p>(d) Telex services (CPC 7523**)</p> <p>(e) Telegraph services (CPC 7522)</p> <p>(f) Facsimile (CPC 7521** + 7529**)</p> <p>(g) Mobile Cellular Telephone Services (CPC 75213)</p> <p>(h) Dedicated Network Services (CPC 75222)</p> <p>(i) Enhance or Value-Added Facsimile Services, Including Store and Forward, Store and Retrieve (CPC 7523**)</p> <p>(j) On-line Information and database Retrieval (CPC 7523**)</p> <p>(k) Internet Access Services Regional and National Paging Services (CPC 75291)</p> <p>(l) Public Payphone Services Voice Mail Service (CPC 7523)</p> <p>(m) Electronic Mail Services and Electronic Mail Box (CPC 75232)</p> <p>(n) Video text Services (CPC 75229)</p> <p>(o) File Transfer Services, Home Telemeter Alarm, Entertainment Services, Management Information Services (CPC 75299)</p>

		(p) On-line Information and or Data Processing (Including transaction processing) (CPC 843**)
Type of Obligation	:	National Treatment (Article 8.4) Market Access (Article 8.5)
Description	:	<u>Trade in Services</u> Indonesia reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to trade in services as defined in subparagraph (r)(iii) of Article 8.1 (Definitions) that requires supply through commercial presence to be in the form of joint venture with no more than 51 per cent of the equity participation in a joint venture to be owned by foreigners.

Sector	:	Communication Services
Subsector	:	(a) Motion Picture and Video Tape production (CPC 9611) (b) Motion Picture and Video Tape Distribution Services (CPC 9611) (c) Motion Picture Projection Services (CPC 9612)
Type of Obligation	:	National Treatment (Article 8.4) Market Access (Article 8.5)
Description	:	<u>Trade in Services</u> Indonesia reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to trade in services as defined in subparagraph (r)(iii) of Article 8.1 (Definitions) that requires supply through commercial presence to be in the form of joint venture subject to following conditions: (a) no more than 51 per cent of the equity participation in a joint venture shall be owned by foreigners; (b) permit requirements for foreign service suppliers may vary from that applicable to Indonesian service suppliers; and (c) the distribution of the motion pictures should be aimed to the regions outside of Java island. Indonesia reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to trade in services as defined in

	subparagraph (r)(i) of Article 8.1 (Definitions) of services of Motion Picture Projection Services (CPC 9612).
--	--

Sector	:	Audiovisual Services
Subsector	:	Sound Recording Services (KBLI 592)
Type of Obligation	:	National Treatment (Article 8.4) Market Access (Article 8.5)
Description	:	<p><u>Trade in Services</u></p> <p>Indonesia reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to trade in services as defined in subparagraph (r)(iii) of Article 8.1 (Definitions) that requires supply through commercial presence to be in the form of joint venture subject to following conditions:</p> <p>(a) no more than 51 per cent of the equity participation in a joint venture shall be owned by foreigners; and</p> <p>(b) permit requirement for foreign service suppliers may vary from that applicable to Indonesian service suppliers.</p>

E. IACEPA

Annex I

Sector:	:	Communication Services
Sub-sector:	:	Postal Services (CPC 7511) and Courier Services (CPC 7512) (Indonesia Standard Industrial Classification 2015, Code 53102-Commercial Postal) excluding Intercity delivery and Universal Post Services.
Obligations Concerned:	:	National Treatment (Article 9.3) Market Access (Article 9.5)
Level of Government:	:	Central
Source of Measure:	:	Postal Law No. 38/2009.

Description:	:	<p>Trade in Services</p> <p>Foreign service suppliers are not permitted to establish a commercial presence in Indonesia to supply postal or courier services, except through a joint venture with only one Indonesian postal service provider with foreign equity not exceeding 49 per cent. The Indonesian joint venture partner must be wholly Indonesian-owned.</p> <p>The joint venture may only operate within a provincial capital that has an international airport or seaport and is prohibited from providing postal and courier services between cities in Indonesia.</p> <p>For greater certainty, cross-border supply and consumption abroad of postal services and courier services are permitted.</p>
--------------	---	---

Annex II

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
-Wired telecommunication services (KBLI 61100) -Wireless/satellite telecommunication services (KBLI 61200, 61300) - Wired/wireless/satellite telecommunication services integrating with telecommunication services (KBLI 61921, 61922, 61923, 61929) -Content telecommunication services (ringtone, premium short	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement	1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners.	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>message services, etc) (KBLI 61911)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Call centers and other added-value telephony services (KBLI 61919) - Internet service providers (KBLI 61921) - Data communications services (KBLI 61922) - Public internet telephony services (KBLI 61923) - Internet interconnection services (Network Access Point), other multimedia services (KBLI 61929) 			
<p>Local Services:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Public Switched Telephone Service (CPC 7521) - Teleconferencing Services (CPC 75292) 	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement.</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners.</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>Long Distance – Public Switched Telephone Service (CPC 7521) – Teleconferencing Services (CPC 75292)</p>	<p>1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement.</p>	<p>1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners.</p>	
<p>International Services : – Public Switched Telephone Service (CPC 7521) – Teleconferencing Services (CPC 75292)</p>	<p>1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement</p>	<p>1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners</p>	
<p>Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**) – Local – International</p>	<p>1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement</p>	<p>1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners</p>	
<p>Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**): Long Distance</p>	<p>1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement.</p>	<p>1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
		venture shall be owned by foreigners.	
Packet-switched public data network services (CPC 7523**) <ul style="list-style-type: none"> - X. 25 - Frame relay - Local - Local distance - International 	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement.	1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners	
Private Leased Circuit Services (CPC 7522**+7523**)	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement	1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners.	
Telex services (CPC 7523**)	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement	1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Telegraph services (CPC 7522)	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement	1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners	
Facsimile (CPC 7521** + 7529**)	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement	1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners	
Electronic data interchange (EDI) (CPC 7523**)	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement.	1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners	
Enhance/Value-Added Facsimile Services, Including Store and Forward, Store and	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement.	1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Retrieve (CPC 7523**)		owned by foreigners	
On-line Information and database Retrieval (CPC 7523**)	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement	1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners	
On-line Information and Data or Processing (Including transaction processing) (CPC 843)	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement	1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners.	
Dedicated Network Services (CPC 7523**)	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement.	1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners	
Domestic Services: – Mobile CellularTelephon	1) None 2) None	1) None 2) None 3) None, except no more than 67 per	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>Telecommunications Services (CPC 75213)</p> <p>– Internet Access Services</p> <p>Regional and National Paging Services (CPC 75291)</p> <p>– Public Payphone Services</p> <p>Voice Mail Service (CPC 7523)</p>	<p>3) None, except joint venture requirement.</p>	<p>67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners</p>	
<p>Voice Mail Services (CPC 7523**)</p> <p>Electronic Mail Services (CPC 75232)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement.</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners</p>	
<p>– Computer Time Sharing Services (CPC-84330)</p> <p>– Video text Services (CPC 75229)</p> <p>– Electronic Mail Box (CPC 75232)</p> <p>– File Transfer Services (CPC 75299)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement.</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except no more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<ul style="list-style-type: none"> - Home Telemeter Alarm (CPC-75299) - Entertainment Services (CPC-75299) - Management Information Services (CPC75299) 			
Audiovisual Services			
Motion Picture and VideoTape production (CPC 9611)	<ul style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement 	<ul style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) None, except: <ul style="list-style-type: none"> a. No more than 51 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreign service suppliers; and b. License requirements for foreign service suppliers may vary from that applicable to Indonesian service suppliers. 	
Motion Picture and Video Tape Distribution Services (CPC 9611)	<ul style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) None, except: <ul style="list-style-type: none"> a) No more than 51 per cent of the 	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
		<p>capital share in a joint venture shall be owned by foreign service suppliers; and</p> <p>b) License requirements for foreign service suppliers may vary from that applicable to Indonesian service suppliers.</p>	
<p>Motion Picture Projection Services (CPC 9612)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except:</p> <p>a) No more than 51 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreign service suppliers; and</p> <p>b) License requirements for foreign service suppliers may vary from that applicable to Indonesian service suppliers.</p>	
<p>Sound Recording (KBLI 59201)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except:</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	3) None, except joint venture requirement.	a) No more than 51 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreign service suppliers; and b) License requirements for foreign service suppliers may vary from that applicable to Indonesian service suppliers.	

F. AANZ FTA

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
C. Telecommunication Services			
All Sub-sectors			(i) Indonesia undertakes additional commitments as per reference paper attached (ii) Type approval mechanism is in place (iii) Tariff related to telecommunication network access is decided by

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
			the government
<p>Local Services</p> <ul style="list-style-type: none"> o Public Switched Telephone Service (CPC 7521) o Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**) o Teleconferencing Services (CPC 75292) 	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Through joint venture with local private sector, and foreign equity participation is limited to 35 per cent</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p>	<p>The period of exclusivity for local services expires in 2011.</p> <p>The Government will conduct a review of policy with respect to whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period.</p>
<p>Long Distance</p> <ul style="list-style-type: none"> o Public Switched telephone service (CPC 7521). o Circuit Switched Public Data Network Services (CPC-7523**) o Teleconferencing Services (CPC-75292) 	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Through joint venture with local private sector, and foreign equity participation is limited to 35 per cent</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p>	
<p>International Services</p> <ul style="list-style-type: none"> o Public Switched 	<p>1) None, except international call-back is not permitted</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p>	<p>The period of exclusivity for local services expires in</p>

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>Telephone service (CPC 7521)</p> <ul style="list-style-type: none"> o Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**) o Teleconferencing Services (CPC 75292) 	<p>2) None, except international call-back is not permitted</p> <p>3) Through joint venture with local private sector, and foreign equity participation is limited to 35 per cent</p>		<p>2011.</p> <p>The Government will conduct a review of policy with respect to whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period</p>
<p>Packet-switched public data network services (CPC 7523**)</p> <ul style="list-style-type: none"> o X. 25 o Frame relay o Local o Local distance o International 	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Through joint venture with local private sector, and foreign equity participation is limited to 35 per cent</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p>	
<p>Telex services</p> <p>Telegraph services</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Through joint venture with local private sector, and foreign equity participation is limited to 35 per cent.</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>Domestic Services:</p> <p>Mobile Cellular Telephone Services (CPC 75213)</p> <p>Internet Access Services</p> <p>Regional and National Paging Services (CPC-75291)</p> <p>Public Payphone Services</p> <p>Voice Mail Service (CPC-7523)</p> <p>Electronic Mail Services (CPC-75232)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Through joint venture with local private sector, and foreign equity participation is limited to 35 per cent</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p>	
<p>Computer Time Sharing Services (CPC-84330)</p> <p>Videotext Services (CPC-75229)</p> <p>Electronic Mail Box (CPC-75232)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Through joint venture with local private sector, and foreign equity participation is limited to 35 per cent</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
File Transfer Services (CPC-75299) Home Telemeter Alarm (CPC-75299) Entertainment Services (CPC-75299) Management Information services (CPC75299)			

G. AJCEP

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
C. Telecommunications Services			
Local Services: a) Public switched telephone service (CPC 7521) b) Circuit switched public data network services (CPC 7523**) Teleconferencing services (CPC 75292)	1) Unbound 2) None 3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity participation is limited to 35 per cent. 4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	1) Unbound 2) None 3) None 4) As specified in horizontal measures	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>Long distance:</p> <p>a) Public switched telephone services (7521)</p> <p>b) Circuit switched public data network services (7523**) Teleconferencing services (75292)</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) None</p> <p>3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity participation is limited to 35 per cent</p> <p>4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) None</p> <p>3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity participation is limited to 35 per cent</p> <p>4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons</p>	
<p>International:</p> <p>a) Public switched telephone services (7521)</p> <p>b) Circuit switched public data network services (7523**) Teleconferencing services (75292)</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) None</p> <p>3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity participation is limited to 35 per cent.</p> <p>4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p> <p>4) As specified in Horizontal measures</p>	
<p>g) Packet-switched public data network services (7523**) - X.25 - Frame relay</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) None</p> <p>3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
- Local - Local Distance - International	participation is limited to 35 per cent. 4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	4) As specified in horizontal measures	
d) Telex services	1) Unbound 2) None 3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity participation is limited to 35 per cent. 4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	1) Unbound 2) None 3) None 4) As specified in horizontal measures	
e) Telegraph services	1) Unbound 2) None 3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity participation is limited to 35 per cent. 4) Natural persons for management and technical	1) Unbound 2) None 3) None 4) As specified in horizontal measures	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	expert is limited to 20 persons		
Domestic: a) Mobile cellular telephone services (75213)	1) Unbound 2) None 3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity participation is limited to 35 per cent. 4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	1) Unbound 2) None 3) None 4) As specified in horizontal measures	
Domestic: Personal mobile cellular communication services	1) Unbound 2) None 3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity participation is limited to 35 per cent. 4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons	1) Unbound 2) None 3) None 4) As specified in horizontal measures	
Internet access services	1) Unbound 2) None 3) Only through joint venture with	1) Unbound 2) None 3) None	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<p>local private sector. Foreign Equity participation is limited to 35 per cent.</p> <p>4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons</p>	<p>4) As specified in horizontal measures</p>	
<p>Domestic: Regional and national paging services (75291)</p>	<p>1) Unbound 2) None 3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity participation is limited to 35 per cent. 4) Natural persons for management and technical expert is limited to 20 persons</p>	<p>1) Unbound 2) None 3) None 4) As specified in horizontal measures</p>	
<p>Domestic: Public payphone services</p>	<p>1) Unbound 2) None 3) Only through joint venture with local private sector. Foreign Equity participation is limited to 35 per cent. 4) Natural persons for management</p>	<p>1) Unbound 2) None 3) None 4) As specified in horizontal measures</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	and technical expert is limited to 20 persons		

H. IJEP A

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Telecommunication Services			
Basic Telecommunication Services : Local Services Long Distance Services International Services Voice Telephone Services (CPC 7521) Circuit Switched Data Transmission Services (CPC 7523**)	1) None 2) None 3) Foreign equity participation is limited to 40 per cent, through joint venture enterprise. The period of exclusivity for local services expires in 2011. The government will conduct a review of policy as to whether to permit additional	1) None 2) None 3) None except as indicated in the Horizontal Section 4) As specified in the Horizontal Section	(i) Indonesia undertakes additional commitments as reference paper attached. (ii) Type approval mechanism is in place. (iii) Basic Telecommunication Services tariff is decided by the government.

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<p>suppliers of such services upon the expiry of this period</p> <p>4) As specified in the Horizontal Section</p>		
<p>Packet Switched Data Transmission (CPC 7523**)</p> <p>Telex Services (CPC 7523**)</p> <p>Telegraph Services (CPC 7522)</p> <p>Facsimile Services (CPC 7521**, 7529**)</p> <p>Private Leased Circuit Services (CPC 7522**, 7523**)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Foreign equity participation is limited to 40 per cent, through joint venture enterprise</p> <p>4) As specified in the Horizontal Section</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None except as indicated in the Horizontal Section</p> <p>4) As specified in the Horizontal Section</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Value-added Services Electronic mail (CPC 7523**) Voice mail (CPC 7523**) On-line information and data base retrieval (CPC 7523**) Electronic data exchange (EDI) (CPC 7523**) Enhanced/value-added facsimile services, including store and forward, store and Retrieve (CPC 7523**) Internet Access Services	1) None 2) None 3) Foreign equity participation is limited to 40 per cent, through joint venture enterprise 4) As specified in the Horizontal Section	1) None 2) None 3) None except as indicated in the Horizontal Section 4) As specified in the Horizontal Section	

I. AKFTA

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Telecommunication Services			
<p>Local service:</p> <p>Public Switched Telephone Services (CPC 7521)</p> <p>Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)</p> <p>Teleconferencing Services (CPC 75292)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Only through joint venture with local private sector</p> <p>Foreign equity participation is limited to 35 per cent.</p> <p>4) Natural persons for management and technical expert for JVC is limited to 20 persons</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) none</p> <p>4) As specified in the Horizontal Section</p>	
<p>Long Distance Services:</p> <p>Public Switched Telephone Service (CPC 7521)</p> <p>Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Only through joint venture with local private sector</p> <p>Foreign equity participation is limited to 40 per cent</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) none</p> <p>4) As specified in the Horizontal Section</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Teleconferencing Services (CPC 75292)	4) Natural person for management and technical expert for JVC is limited to 20 persons		
International: Public Switched Telephone Service (CPC 7521) Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**) Teleconferencing Services (CPC 75292)	1) None 2) None 3) Only through joint venture with local private sector Foreign equity participation is limited to 40 per cent 4) Natural person for management and technical expert for JVC is limited to 20 persons	1) None 2) None 3) none 4) As specified in the Horizontal Section	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>Packet-switched public data network services (CPC 7523**) <ul style="list-style-type: none"> - X.25 - Frame relay - Local - Local distance - International </p>	<p>1) None 2) None 3) Only through joint venture with local private sector Foreign equity participation is limited to 40 per cent 4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons</p>	<p>1) None 2) None 3) none 4) As specified in the Horizontal Section</p>	
<p>Telex Services</p>	<p>1) None 2) None 3) Only through joint venture with local private sector Foreign equity participation is limited to 40 per cent 4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons</p>	<p>1) None 2) None 3) none 4) As specified in the Horizontal Section</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Telegraph Services	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Only through joint venture with local private sector</p> <p>Foreign equity participation is limited to 40 per cent</p> <p>4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) none</p> <p>4) As specified in the Horizontal Section</p>	
<p>Domestic:</p> <p>Mobile Cellular Telephone (CPC 75213)</p> <p>Personal Mobile Cellular Communication</p> <p>Regional and National Paging Service (CPC 75291)</p> <p>Public Payphone Service</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Only through joint venture with local private sector</p> <p>Foreign equity participation is limited to 40 per cent</p> <p>4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) none</p> <p>4) As specified in the Horizontal Section</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Internet Access Services	1) None 2) None 3) Only through joint venture with local private sector Foreign equity participation is limited to 40 per cent 4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons	1) None 2) None 3) none 4) As specified in the Horizontal Section	
Voice mail services (CPC 7523) Electronic mail services (CPC 75232) Computer time sharing services (CPC 84330) Video text services (CPC 75229)	1) None 2) None 3) Access granted for five foreign services provider companies, in addition to the existing companies 4) Unbound, except for director and technical expert	1) None 2) None 3) Higher paid up capital is required of foreign service suppliers than of domestic services suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. 4) As specified in the Horizontal Section	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>Electronic mail box (CPC 75232)</p> <p>File transfer services (CPC 75299)</p> <p>Home telemetering alarm (CPC 75299)</p> <p>Entertainment services (CPC 75299)</p> <p>Management information services (CPC 75299)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Access granted for five foreign services provider companies, in addition to the existing companies</p> <p>4) Unbound, except for director and technical expert</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Higher paid up capital is required of foreign service suppliers than of domestic services suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.</p> <p>4) As specified in the Horizontal Section</p>	

J. AIFTA

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Telecommunication Services			
<p>Local service: - Public switched telephone service (CPC 7521)</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Local services are</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) None</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>- Circuit switched public data network services (CPC 7523**))</p> <p>- Teleconferencing services (CPC 75292)</p>	<p>provided exclusively by PT Telkom and 5 regional joint operation scheme operators.</p> <p>Type of legal entity required:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joint venture, - Joint operation, or - Contract management <p>Foreign equity participation is limited to 35 per cent.</p> <p>The government will conduct a review of policy with respect of whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period</p> <p>(4) Natural person for management and technical</p>	<p>(4) As specified in the Horizontal Section</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	expert for a JVC is limited to 20 persons for all companies concerned		
<p>Long distance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Public switched telephone service (CPC 7521) - Circuit switched public data network services (CPC 7523**) - Teleconferencing services (CPC 75292) 	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Only through joint venture with local private sector foreign equity participation is limited to 40 per cent. The period of exclusivity for long distance expires 2006. The Government will conduct a review of policy with respect whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period</p> <p>(4) Natural person for management and technical expert for a JVC is limited to 20</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) None</p> <p>(4) As specified in the Horizontal Section</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	persons for all companies concerned		
<p>International:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Public switched telephone service (CPC 7521) - Circuit switched public data network services (CPC 7523**) - Teleconferencing services (CPC 75292) 	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Only through joint venture with local private sector foreign equity participation is limited to 40 per cent.</p> <p>The period of exclusivity for international services expires in 2005. The government will conduct a review of policy with respect of whether to permit additional suppliers of such services upon the expiry of this period</p> <p>(4) Natural person for management and technical expert for JVC is limited to 20</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) None</p> <p>(4) As specified in the Horizontal Section</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	persons for all companies concerned.		
<p>Packet-switched public data network services (CPC 7523**) <ul style="list-style-type: none"> - X. 25 - Frame relay - Local - Local distance - International <p>Telex Services</p> <p>Telegraph Services</p> <p>Domestic: <ul style="list-style-type: none"> - Mobile cellular telephone Services(CPC 75213) - Personal Mobile Cellular Communication - Regional and National Paging Services (CPC75291) </p> </p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 40 per cent</p> <p>(4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons for all companies concerned</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) None</p> <p>(4) As specified in the Horizontal Section</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
-Public Payphone Services			
Internet Access Services	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Only through Joint venture with local private sector. Foreign equity participation is limited to 40 per cent</p> <p>4) Natural person for management and technical expert is limited to 20 persons.</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Higher paid up capital is required of foreign service suppliers than of domestic services suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.</p> <p>(4) As specified in the Horizontal Section</p>	
<p>- Voice mail service (CPC 7523)</p> <p>- Electronic Mail Services (CPC 75232)</p> <p>- Computer Time Sharing Services (CPC 843330)</p> <p>- Video Text Services (CPC 75229)</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies</p> <p>(4) Unbound except for director and technical expert</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.</p> <p>(4) As specified in the Horizontal Section</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<ul style="list-style-type: none"> - File Transfer Services (CPC 75299) - Home Telemetering Alarm (CPC 75299) - Entertainment Services (CPC 75299) - Management Information Services (CPC 75299) 	<ul style="list-style-type: none"> (1) None (2) None (3) Access granted for five foreign service provider companies, in addition to existing companies (4) Unbound except for director and technical expert 	<ul style="list-style-type: none"> (1) None (2) None (3) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. (4) As specified in the Horizontal Section 	

K. IKCEPA

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Postal Services			
Postal Services (CPC 7511)	<ul style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement. 4) Unbound 	<ul style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) None, except only allowed to established within a provincial capital, that has had an 	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
		<p>international airport and/or seaport.</p> <p>Cooperate with one domestic postal service provider through joint venture with majority share is owned by the domestic postal service provider. Provided that share/holding of the domestic postal service provider are not owned by foreign natural person or foreign juridical person that is affiliated with domestic postal services provider.</p> <p>4) Unbound</p>	
Courier Services			
<p>Courier Services (CPC 7512)</p>	<p>1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement. 4) Unbound</p>	<p>1) None 2) None 3) None, except only allowed to establish within a provincial capital, that has had an</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
		international airport and/or seaport. 4) Unbound	
Telecommunication Services			
<p>Local Services:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Public Switched Telephone Service (CPC 7521); and o Teleconferencing Services (CPC 75292) 	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement with no more than 35% of the capital share shall be owned by foreigners.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	
<p>Long Distance:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Public Switched Telephone Service (CPC 7521); and o Teleconferencing Services (CPC 75292) 	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement with no more than 35% of the capital share shall be owned by foreigners.</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except services shall be provided in certain provinces and or necessary areas.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.	subject to Appendix 6-B-2.	
<p>International Services:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Public Switched Telephone Service (CPC 7521); and o Teleconferencing Services (CPC 75292) 	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement with no more than 35% of the capital share shall be owned by foreigners.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	
<p>Circuit Switched Public Data Network Services (CPC 7523**)</p> <ul style="list-style-type: none"> o Local; o International; o Long Distance 	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement with no more than 51% of the capital share shall be owned by foreigners.</p> <p>4) Unbound, except as</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	specified in and subject to Appendix 6-B-2.		
Packet-switched public data network services (CPC 7523**) <ul style="list-style-type: none"> o X. 25 o Frame relay o Local o Long distance o International 	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement with no more than 51% of the capital share shall be owned by foreigners. 4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.	1) None 2) None 3) None 4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.	
Telex services (CPC 7523**) Telegraph services (CPC 7522) Facsimile (CPC 7521** + 7529**)	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement with no more than 51% of the capital share shall be owned by foreigners. 4) Unbound, except as specified in and	1) None 2) None 3) None 4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	subject to Appendix 6-B-2.		
Private Leased Circuit Services (CPC 7522** + 7523**)	<ol style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement with no more than 51% of the capital share shall be owned by foreigners. 4) Unbound, except for Manager, Technical Expert/Advisor, and Business Visitor as specified in and subject to Appendix 6-B-2. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) None 4) Unbound, except for Manager, Technical Expert/Advisor, and Business Visitor as specified in and subject to Appendix 6-B-2. 	
Dedicated Network Services (CPC 75222)	<ol style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement with no more than 51% of the capital share 	<ol style="list-style-type: none"> 1) None 2) None 3) None, except: <ol style="list-style-type: none"> a) services shall be provided in certain provinces 	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<p>shall be owned by foreigners.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	<p>and or necessary areas;</p> <p>b) services shall be provided only for closed user group; and</p> <p>c) network provider is prohibited to connect to other networks.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	
<p>On-line Information and Database Retrieval (CPC 7523**)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement with no more than 51% of the capital share shall be owned by foreigners.</p> <p>4) Unbound, except for Manager, Technical Expert/Advisor, and Business Visitor as</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement.</p> <p>4) Unbound, except for Manager, Technical Expert/Advisor, and Business Visitor as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	specified in and subject to Appendix 6-B-2.		
Electronic Data Interchange (EDI) (CPC 7523**)	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except aggregate foreign equity participation is permitted up to 70% provided that up to 49% through foreign direct investment and the remaining percentage through other mechanisms.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	
Enhanced/Value Added Facsimile Services, including Store and Forward, Store and Retrieve (CPC 7523**)	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement with no more than 51% of the capital share</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	<p>shall be owned by foreigners.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	<p>subject to Appendix 6-B-2</p>	
<p>On-line Information and or Data Processing (including transaction processing) (CPC 843**)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement with no more than 51% of the capital share shall be owned by foreigners.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	
<p>Domestic Services:</p> <p>Mobile Cellular Telephone Services (CPC 75213)</p> <p>Internet Access Services Regional and National</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement with no more than 35% of the capital share shall be owned by foreigners.</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
<p>Paging Services (CPC 75291)</p> <p>Public Payphone Services Voice Mail Service (CPC 7523)</p> <p>Electronic Mail Services (CPC 75232)</p>	<p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	<p>subject to Appendix 6-B-2.</p>	
<p>Computer Time Sharing Services (CPC 84330)</p> <p>Videotext Services (CPC 75229)</p> <p>Electronic Mail Box (CPC 75232)</p> <p>File Transfer Services (CPC 75299)</p> <p>Home Telemeter Alarm (CPC 75299)</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement with no more than 35% of the capital share shall be owned by foreigners.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except:</p> <p>a) services shall be provided in certain provinces and or necessary areas;</p> <p>b) services shall be provided only for closed user group; and</p> <p>c) network provider is prohibited to connect to other networks.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
Entertainment Services (CPC 75299) Management Information Services (CPC 75299)		subject to Appendix 6-B-2	
Audiovisual Services			
a) Motion Picture and Video Tape Production (CPC 9611)	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement with no more than 51% of the capital share shall be owned by foreigners. 4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.	1) None 2) None 3) None, except joint venture requirement and license fee requirements for foreign service suppliers may vary from that applicable to Indonesian service suppliers. 4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.	
b) Motion Picture and Video Tape Distribution Services	1) None 2) None 3) None, except joint venture	1) None 2) None 3) None, except:	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
(CPC 9611)	<p>requirement with no more than 51% of the capital share shall be owned by foreigners.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	<p>a) the distribution of the motion pictures should be aimed to the regions outside of Java Island; and</p> <p>b) license fee requirements for foreign service suppliers may vary from that applicable to Indonesian service suppliers.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	
<p>c) Motion Picture Projection Services (CPC 9612)</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement with no more than 51% of the capital share shall be owned by foreigners.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement and the distribution of the motion pictures should be aimed to the regions outside of Java Island.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and</p>	

Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitment
	subject to Appendix 6-B-2.	subject to Appendix 6-B-2.	
e) Sound Recording (KBLI 592)	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except joint venture requirement with no more than 51% of the capital share shall be owned by foreigners.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None, except:</p> <p>a) joint venture requirement; and</p> <p>b) license fee requirements for foreign service suppliers may vary from that applicable to Indonesian service suppliers.</p> <p>4) Unbound, except as specified in and subject to Appendix 6-B-2.</p>	

BAB IV

ISU PERUNDINGAN DI SEKTOR JASA KOMUNIKASI

Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menunjang keberlangsungan perekonomian dunia terus meningkat. Keberadaan TIK dapat meningkatkan akses bagi negara-negara di dunia dalam berkomunikasi dan menjalin kerja sama terutama pada kondisi pandemik saat ini. Untuk meningkatkan peran TIK tersebut, beberapa negara mengalami hambatan diantaranya:

- a. pembatasan akses pada broadband bagi penyedia jasa
- b. pembatasan cross-border data flows yang terkait dengan penerapan aturan ketat mengenai perlindungan data pribadi, internet protocol (IP) protection, dan penerapan data localization
- c. aturan performance requirements dan non-discriminations rules yang terkait dengan local content requirements (TKDN), penggunaan teknologi atau software lokal tertentu (treatment on digital products), dan pemaksaan terhadap transfer teknologi.

Hambatan-hambatan tersebut merupakan beberapa isu yang dapat dirundingkan dalam sebuah perundingan perdagangan internasional khususnya sektor jasa komunikasi. Apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, Services Trade Restrictiveness Index (STRI) Indonesia masih lebih tinggi, yang berarti perdagangan jasa komunikasi masih mengalami banyak hambatan. STRI Indonesia paling tinggi disebabkan hambatan untuk berkompetisi yang cukup tinggi, dan hal ini mencerminkan bahwa regulasi yang ada masih belum memadai untuk pemain baru.

Adapun potensi yang dapat dimanfaatkan dengan adanya perundingan perdagangan jasa internasional, antara lain:

1. Pengembangan sektor jasa komunikasi yang berdaya saing
2. Pembukaan akses pasar internasional bagi penyedia jasa domestik untuk mengembangkan usahanya
3. Perluasan jaringan kerja sama bagi pelaku usaha/ industri sektor jasa komunikasi
4. Pengakuan kompetensi penyedia jasa domestik dengan penyedia jasa asing
5. Pemanfaatan komitmen Indonesia bagi keberlangsungan sektor jasa komunikasi baik di domestik maupun internasional
6. Perubahan sistem informasi yang lebih baik guna mendukung perekonomian negara.

Indonesia masih berupaya untuk memperbaiki regulasi di sektor jasa komunikasi. Adapun implikasi dari adanya perbaikan regulasi tersebut satu diantaranya memberikan ruang investasi yang lebih besar bagi penanam modal asing mengingat sektor jasa ini adalah industri padat modal. Tercatat beberapa keterbukaan tersebut, antara lain:

1. penyelenggaraan jasa telekomunikasi menjadi tidak dibatasi
2. penyediaan menara telekomunikasi menjadi tidak dibatasi
3. keterbukaan pada marketplace dan e-commerce juga tidak dibatasi
4. investasi asing di sektor pos dan kurir mencapai 49 persen

Relaksasi ini memiliki peranan penting pada peningkatan daya saing sektor jasa komunikasi dalam negeri, khususnya dari sisi peningkatan teknologi dan jaringan usaha yang mendukung aktifitas ekspor. Selain hal tersebut, adanya kewajiban pemasok jasa asing di Indonesia untuk memberikan transfer pengetahuan terkait literasi digital dan teknologi kepada pemasok jasa lokal dapat mempercepat proses adopsi teknologi serta meningkatkan kapasitas SDM Indonesia.

Secara umum, berdasarkan Modul Application of the GATS to Individual Services Sectors, tiga jenis hambatan akses pasar pada subsektor jasa telekomunikasi, adalah (i) limitasi jumlah penyedia jasa, (ii) limitasi partisipasi modal asing, dan (iii) limitasi mengenai bentuk badan hukum. Limitasi-limitasi tersebut melekat pada moda 3 penyediaan jasa – Commercial Presence-. Selain limitasi-limitasi tersebut di atas, terdapat juga jenis limitasi lainnya yang membatasi level keterbukaan, misalnya 'routing restrictions' yang seringkali dikomitmenkan pada moda 1 sebagai upaya untuk membatasi ketersediaan jaringan yang masih dimonopoli. Terdapat juga limitasi lain dalam komitmen subsektor jasa telekom yang mengindikasikan bahwa akses pasar tersebut baru dibuka sebagian, misalnya tidak dikomitmenkannya aktifitas tertentu seperti 'resale' dan 'call back services.' Limitasi ini menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada kuota yang diberikan. Selain restriksi pada akses pasar, terdapat juga restriksi pada perlakuan nasional yang cenderung tidak lazim, misalnya ketentuan mengenai komposisi atau pemegang kendali dewan direksi di sebuah perusahaan.

BAB V

PENUTUP

Sektor jasa komunikasi adalah sektor yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Sektor ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tiap tahunnya. Pertumbuhan sektor jasa komunikasi menunjukkan bahwa sektor ini mampu memanfaatkan momentum untuk meraih peluang pertumbuhan meskipun dalam situasi penuh tantangan.

Jasa telekomunikasi merupakan salah satu jasa komunikasi yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Perkembangan telekomunikasi yang pesat tidak dapat dipungkiri telah memberikan perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan aktivitas bisnis. Jarak dan batas teritorial suatu negara tidak menjadi hambatan untuk dapat melakukan komunikasi dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Perusahaan telekomunikasi di Indonesia telah menyediakan produk berupa jasa telekomunikasi baik domestik, internasional. Jasa-jasa telekomunikasi yang ditawarkan meliputi sambungan tetap dan bergerak, komunikasi udara dan sewa sambungan, dan berbagai jasa bernilai tambah.

Globalisasi ekonomi yang diwujudkan secara konkrit dalam kesepakatan baik di kawasan regional, multilateral maupun bilateral dalam menciptakan perdagangan dunia yang bebas memberikan tekanan kuat bagi negara di dunia untuk mengakhiri monopoli sektor jasa komunikasi. Dengan adanya liberalisasi maka dimulai era kompetensi sektor komunikasi yang menciptakan suatu lingkungan baru dan membuka kesempatan bisnis baru. Dalam lingkup fora internasional, komitmen yang telah disepakati oleh negara anggota harus dilaksanakan. Komitmen untuk liberalisasi jasa komunikasi didokumentasikan dalam *Schedule of Commitments* masing-masing negara. Sub sektor yang dikomitmenkan tersebut untuk tiap perjanjian tidak selalu sama. Secara bertahap komitmen tersebut akan lebih luas (liberal) sesuai dengan kesepakatan negara anggota.

Dengan adanya perjanjian perdagangan internasional dalam wujud FTA/CEPA, diharapkan dapat membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih maju dan berkembang khususnya di sektor jasa komunikasi. Selain itu, keberadaan FTA/CEPA dapat meningkatkan daya saing dan kompetensi penyedia jasa lokal dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia.

REFERENSI

Dokumen WTO MTN.GNS/W/120, Services Sectoral Classification List, Note By The Secretariat

Dokumen WTO S/C/W/299, Telecommunication Services, Background Note by the Secretariat

Schedule of Specific Commitment (SoC) Conditional Offer in WTO

Schedule of Specific Commitment (SoC) in ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Package 10

Schedule of Specific Commitment (SoC) in IJEPA

Schedule of Specific Commitment (SoC) in AKFTA

Schedule of Specific Commitment (SoC) in AJCEP

Schedule of Specific Commitment (SoC) in AANZFTA

“Analisis Penawaran Dan Permintaan Sektor Jasa Dalam Perekonomian Nasional.”2016.World Bank bekerjasama Dengan Presisi Indonesia

Laporan Akhir Kajian Strategi Peningkatan Daya Saing Sektor Jasa Komunikasi. 2021. DPPJ bekerja sama dengan CEDS-Unpad